

ONTOLOGI NILAI ISLAM DALAM PANCASILA: KAJIAN FILOSOFIS TERHADAP JATI DIRI BANGSA INDONESIA

Syamzaimar

Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pengaraian. Rokan Hulu-Riau, Indonesia

ABSTRACT

Moral crisis, value disorientation, and the weakening of public ethics indicate a fundamental problem in the interpretation of Pancasila as the value system of the Indonesian nation. In practice, Pancasila is often reduced to a formal symbol and constitutional normative instrument, resulting in the loss of its vitality as a worldview that guides the moral orientation of individuals, society, and state administrators. This article aims to analyze the ontology of Islamic values within Pancasila through a philosophical approach, emphasizing the position of Islamic values as a transcendent moral foundation that substantively contributes to the formation of the Indonesian national identity. This study employs a library research method with a philosophical, descriptive, and interpretative approach to the literature on value philosophy, Islamic thought, and Pancasila philosophy. The findings reveal that Islamic values—such as tawhid, justice, humanity, deliberation, and public welfare—ontologically align with the value structure of Pancasila. These values are not merely compatible but also enliven the ethical meaning of Pancasila as a national value system. The study concludes that strengthening Islamic values in the interpretation of Pancasila has significant implications for reinforcing national identity, particularly in shaping social ethics and state governance ethics.

 OPEN ACCESS

ARTICLE HISTORY

Received: 04-02-2026

Accepted: 10-04-2026

KEYWORDS

value ontology, Islamic values, Pancasila, national identity

Introduction

Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menghadapi persoalan serius berupa krisis moral, disorientasi nilai, dan melemahnya etika publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fenomena tersebut tercermin dalam praktik pragmatisme politik, rendahnya keteladanan pemimpin publik, serta melemahnya komitmen terhadap nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan bersama. Kondisi ini menunjukkan bahwa problem kebangsaan tidak semata-mata bersifat struktural dan institusional, melainkan berakar pada persoalan nilai yang bersifat mendasar dan filosofis.

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa seharusnya berfungsi sebagai sistem nilai yang membimbing orientasi moral individu, masyarakat, dan penyelenggara negara. Namun dalam praktiknya, Pancasila kerap direduksi menjadi simbol formal, slogan ideologis, atau perangkat normatif konstitusional. Pemaknaan yang demikian menyebabkan Pancasila kehilangan daya hidupnya sebagai pandangan hidup

CONTACT: ✉ syamzaimar@isqsyekh Ibrahim.ac.id

© 2026 Syamzaimar . Published by Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru, ID.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, and is not altered, transformed, or built upon in any way.

(*weltanschauung*) yang mampu mengarahkan perilaku dan keputusan publik. Akibatnya, nilai-nilai Pancasila tidak sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik kehidupan sosial dan politik (Kaelan, 2014).

Pendekatan normatif-legal dalam memahami Pancasila terbukti belum memadai untuk menjelaskan legitimasi moral dan daya ikat etis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan filosofis yang lebih mendalam, khususnya melalui kajian ontologis terhadap nilai. Ontologi nilai memandang nilai bukan sekadar hasil kesepakatan sosial atau konstruksi historis, melainkan sebagai realitas normatif yang memiliki legitimasi moral dan daya ikat etis bagi tindakan manusia (Bertens, 2013). Pendekatan ini memungkinkan Pancasila dipahami sebagai sistem nilai yang memiliki dasar keberadaan dan makna yang melampaui kepentingan pragmatis.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius dan plural, nilai-nilai Islam memiliki peran historis dan sosiologis yang signifikan dalam pembentukan etika sosial dan karakter bangsa. Nilai-nilai seperti tauhid, keadilan, kemanusiaan, musyawarah, dan kemaslahatan telah lama hidup dan membentuk praktik sosial masyarakat Indonesia. Namun demikian, relasi antara nilai Islam dan Pancasila sering kali dipahami secara normatif dan historis semata, tanpa penggalian filosofis yang memadai mengenai kedudukan ontologis nilai Islam dalam struktur nilai Pancasila.

Nilai-nilai Islam yang menjadi basis moral transenden dalam Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga memiliki dimensi metafisik yang mendasari eksistensi dan legitimasi moral nilai tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Attas (1995), ontologi nilai dalam tradisi Islam berakar pada konsep ketauhidan yang menegaskan hubungan eksistensial antara manusia dan Tuhan sebagai sumber nilai tertinggi. Konsep ini menegaskan bahwa nilai tidak bersifat arbitrer atau relatif, melainkan memiliki keberadaan yang objektif dan universal karena berakar pada realitas transenden. Dengan demikian, integrasi nilai Islam dalam Pancasila memperkuat landasan moralnya melalui fondasi metafisik yang kokoh.

Lebih jauh, Notonagoro (1984) menekankan pentingnya pemahaman Pancasila sebagai falsafah hidup yang bersifat integral dan menyeluruh, di mana nilai-nilai agama menjadi bagian esensial yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai sosial dan politik. Dalam konteks ini, nilai Islam yang berakar pada prinsip tauhid dan keadilan sosial memperkuat landasan filosofis Pancasila, sehingga menjadikannya sebagai sistem nilai yang holistik dan berdaya tahan. Pendekatan ontologis ini menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar simbol politik, melainkan sumber legitimasi moral yang mendalam.

Selain itu, sebagaimana dijelaskan oleh Fazlur Rahman (1982), nilai-nilai Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dinamis dan kontekstual, yang memungkinkan adaptasi dan relevansi dalam berbagai situasi sosial-politik. Pendekatan ini menegaskan bahwa nilai Islam dapat berfungsi sebagai landasan moral yang fleksibel namun tetap kokoh dalam menghadapi tantangan modernitas, termasuk dalam kerangka sistem nilai Pancasila yang plural dan inklusif. Di sisi lain, Yudi Latif (2018) menggarisbawahi peran Pancasila sebagai sumber etika politik yang berfungsi untuk mengarahkan kebijakan publik dan penyelenggaraan negara secara adil dan berkeadaban. Nilai-nilai Islam yang menekankan musyawarah dan kemaslahatan umum secara langsung mendukung fungsi ini dengan menyediakan kerangka moral dalam pengambilan keputusan kolektif.

Dinamika globalisasi dan modernisasi yang bercorak individualistik sering kali berhadapan dengan akar moral masyarakat Indonesia. Dalam situasi ini, Pancasila seharusnya berfungsi sebagai titik temu nilai (*common platform*). Namun, sebagian kajian terdahulu cenderung menempatkan hubungan antara Islam dan Pancasila pada tataran kompromi historis atau integrasi pedagogis semata. Kesenjangan dalam menggali secara

mendalam dimensi ontologis mengenai dasar keberadaan nilai Islam dalam Pancasila inilah yang menjadi ruang akademik bagi penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengkaji ontologi nilai Islam dalam Pancasila melalui pendekatan filosofis. Kajian ini tidak dimaksudkan untuk menempatkan Pancasila dalam posisi subordinat terhadap agama tertentu, melainkan untuk menegaskan bahwa nilai Islam berkontribusi secara substantif sebagai basis moral transenden yang menghidupkan makna etis Pancasila. Dengan pendekatan ini, Pancasila diposisikan kembali sebagai sistem nilai yang hidup dan relevan dalam membentuk jati diri bangsa Indonesia, khususnya dalam konteks penguatan etika sosial dan etika penyelenggaraan negara yang berintegritas.

Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada penelusuran konsep, makna, dan dasar filosofis nilai, khususnya ontologi nilai Islam dalam struktur nilai Pancasila. Penelitian kepustakaan memungkinkan analisis mendalam terhadap gagasan dan argumentasi teoretis tanpa bergantung pada pengumpulan data empiris lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis dengan penekanan pada analisis ontologis dan normatif. Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji hakikat keberadaan nilai, sumber legitimasi moral, serta relasi antara nilai Islam dan Pancasila sebagai sistem nilai bangsa. Melalui pendekatan ini, Pancasila dipahami tidak hanya sebagai dokumen normatif atau ideologi politik, tetapi sebagai sistem nilai yang memiliki dasar keberadaan dan daya ikat etis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sumber data penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah yang relevan. Literatur tersebut meliputi buku-buku filsafat, karya pemikir Islam klasik dan kontemporer, literatur tentang Pancasila dan filsafat kebangsaan, serta artikel jurnal nasional dan internasional yang membahas ontologi nilai, etika publik, dan pendidikan kewarganegaraan. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi konseptual, otoritas akademik penulis, dan kontribusinya terhadap pengembangan kajian filsafat nilai dan filsafat Pancasila.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji secara sistematis berbagai sumber pustaka yang berkaitan langsung dengan tema penelitian. Setiap sumber dianalisis untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci, argumentasi utama, serta pandangan filosofis yang relevan dengan ontologi nilai Islam dan Pancasila. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (*content analysis*) dan refleksi filosofis. Analisis isi digunakan untuk mengkaji makna, struktur, dan keterkaitan konsep-konsep nilai dalam literatur yang ditelaah. Sementara itu, refleksi filosofis digunakan untuk melakukan penafsiran kritis terhadap konsep nilai, relasi antar gagasan, serta implikasi ontologis nilai Islam dalam struktur nilai Pancasila. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan koheren mengenai kedudukan ontologis nilai Islam dalam Pancasila serta menjelaskan implikasinya terhadap pembentukan jati diri bangsa Indonesia dan penguatan etika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Result

Berdasarkan kajian kepustakaan dan analisis filosofis yang dilakukan, penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan konseptual mengenai kedudukan ontologis nilai Islam dalam struktur nilai Pancasila. Temuan-temuan ini tidak berbentuk data empiris kuantitatif, melainkan berupa hasil sintesis konseptual dan penegasan posisi teoretis yang relevan dengan tujuan penelitian. Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila memiliki kedudukan sebagai sistem nilai yang bersifat ontologis, bukan semata-mata konstruksi normatif atau simbol ideologis. Nilai-nilai Pancasila terbukti memiliki legitimasi moral yang mengikat karena berfungsi sebagai orientasi etis bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan nilai Pancasila tidak sepenuhnya bergantung pada konsensus politik, melainkan pada kedalaman makna filosofis yang menopangnya.

Kedua, penelitian ini menemukan adanya keselarasan ontologis antara nilai-nilai Islam dan struktur nilai Pancasila. Nilai Islam yang berakar pada prinsip tauhid, keadilan, kemanusiaan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial menunjukkan kompatibilitas substansial dengan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial dalam Pancasila. Keselarasan ini bersifat etis-filosofis, bukan legal-formal atau ideologis. Ketiga, hasil kajian menunjukkan bahwa nilai Islam berfungsi sebagai basis moral transenden yang memperkuat daya ikat etis Pancasila. Dimensi transendensi nilai Islam memberikan legitimasi moral yang melampaui relativisme sosial dan pragmatisme politik, sehingga Pancasila dapat dipahami sebagai sistem nilai yang memiliki ketahanan etis dalam menghadapi dinamika sosial dan perubahan zaman.

Keempat, penelitian ini menemukan bahwa penguatan Pancasila sebagai sistem nilai tidak dapat dilepaskan dari proses internalisasi nilai yang berkelanjutan. Internalisasi nilai menjadi prasyarat utama agar Pancasila berfungsi sebagai panduan etis yang hidup, bukan sekadar norma formal. Temuan ini menegaskan pentingnya peran pendidikan kewarganegaraan dan praktik etika publik sebagai medium aktualisasi nilai Pancasila. Kelima, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan jati diri bangsa Indonesia berkorelasi erat dengan keberhasilan internalisasi nilai Pancasila yang diperkaya oleh nilai Islam. Jati diri bangsa dipahami sebagai ekspresi nilai normatif-etis yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan orientasi moral kolektif, bukan sekadar identitas simbolik atau historis.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kajian ontologi nilai Islam dalam Pancasila menghasilkan pemahaman konseptual yang memperkuat posisi Pancasila sebagai sistem nilai bangsa yang berakar pada fondasi moral yang kokoh, bersifat inklusif, dan relevan dengan tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara di era modern.

Discussion

1.1 Hakikat Ontologis Nilai dalam Pancasila

Dalam membedah kedalaman makna Pancasila, penting untuk menempatkannya dalam kerangka ontologi nilai yang komprehensif. Ontologi nilai bukan sekadar studi tentang apa yang dianggap baik, melainkan kajian mendalam mengenai dasar keberadaan (*existence*) dan legitimasi moral dari nilai-nilai tersebut. Dalam konteks ini, Pancasila tidak boleh dipandang sebatas norma hasil kesepakatan sosial (*social contract*) yang bersifat artifisial, melainkan sebagai realitas normatif yang memiliki daya ikat etis yang fundamental bagi jati diri bangsa.

Secara ontologis, kelima sila dalam Pancasila mulai dari Ketuhanan hingga Keadilan Sosial—berfungsi sebagai prinsip moral yang mengarahkan tindakan individu maupun kolektif. Nilai-nilai ini memberikan legitimasi moral yang diperlukan untuk membentuk karakter bangsa Indonesia. Sejalan dengan pemikiran Soedjatmoko (1985), Pancasila harus dipahami sebagai suatu sistem nilai yang hidup (*living system*) dan senantiasa relevan dengan dinamika masyarakat. Hal ini dipertegas oleh Nugroho Notosusanto (1995) yang menekankan bahwa sebagai dasar negara, Pancasila wajib menjadi pedoman dalam setiap helai nafas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lebih jauh lagi, Pancasila memiliki struktur nilai yang bersifat integral dan hierarkis. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa bertindak sebagai fondasi moral transenden yang menjiwai dan menyinari sila-sila berikutnya. Struktur ini menunjukkan sebuah bangunan filosofis yang koheren: setiap sila saling berkaitan dan saling menguatkan. Dalam kerangka ini, Pancasila memiliki daya ikat moral yang melampaui kepentingan pragmatis kekuasaan, memosisikannya bukan sekadar alat politik, melainkan kompas etis menuju kehidupan yang adil dan beradab.

Secara filosofis, nilai-nilai dalam Pancasila dapat dipahami sebagai nilai objektif. Keberadaannya tidak sepenuhnya bergantung pada kesepakatan subjektif manusia yang bisa berubah sewaktu-waktu (Bertens, 2013). Nilai-nilai tersebut memperoleh legitimasi etis karena berfungsi sebagai orientasi moral bersama yang mengikat secara universal dalam ruang lingkup keindonesiaan. Oleh karena itu, Pancasila memuat kedalaman normatif yang melampaui fungsi hukum positif.

Perbedaan mendasar antara nilai dan hukum terletak pada mekanisme kerjanya. Jika hukum bekerja melalui pemaksaan eksternal (*external enforcement*), maka nilai beroperasi pada tingkat kesadaran internal manusia. Keberhasilan Pancasila sebagai sistem nilai sangat ditentukan oleh sejauh mana nilai-nilainya dihayati dan dijadikan dasar pertimbangan etis dalam pengambilan kebijakan publik maupun tindakan personal.

Pendekatan ontologis ini memungkinkan Pancasila diposisikan sebagai "pandangan hidup yang hidup" (*living values*). Nilai-nilai ini tidak boleh berhenti pada hafalan formal atau slogan ideologis. Ketika Pancasila direduksi menjadi sekadar instrumen normatif, dimensi ontologisnya akan melemah, dan ia akan kehilangan daya transformatifnya.

Keberadaan nilai Pancasila memang tidak dapat dilepaskan dari konteks historis dan kultural bangsa Indonesia, namun konteks tersebut tidaklah mendegradasi sifat normatifnya. Sebaliknya, nilai Pancasila hadir sebagai hasil dialektika yang indah antara realitas sosial-historis dengan prinsip-prinsip moral universal yang hidup dalam kesadaran kolektif bangsa. Dengan menghayati dimensi ontologis ini, kita tidak hanya menerapkan Pancasila karena kewajiban warga negara, tetapi karena pengakuan tulus atas martabat kemanusiaan yang berkeadilan.

1.2 Nilai Islam sebagai Basis Moral Transenden dalam Struktur Pancasila

Nilai Islam memiliki karakter ontologis yang berakar pada prinsip tauhid, yaitu pengakuan terhadap keesaan Tuhan sebagai sumber utama nilai, kebenaran, dan moralitas. Prinsip ini menegaskan bahwa nilai-nilai moral tidak bersifat relatif sepenuhnya, melainkan memiliki dasar transendensi yang memberikan legitimasi etis yang mengikat.

Dalam tradisi pemikiran Islam, nilai dipahami sebagai amanah moral yang menuntut pertanggungjawaban. Nilai tidak berhenti pada tataran normatif-doktrinal, tetapi terwujud dalam etika personal dan sosial yang menuntun perilaku manusia. Dengan demikian, nilai Islam memiliki dimensi ontologis dan teleologis sekaligus. Dimensi transendensi nilai Islam menjadikannya relevan dalam kehidupan publik. Moralitas

individu dan keadilan sosial dipahami sebagai dua ranah yang saling berkaitan, sehingga nilai religius tidak tereduksi menjadi urusan privat semata. Prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial menjadi dasar etika kolektif.

Dalam konteks Pancasila, dimensi transendensi tersebut tercermin pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjiwai keseluruhan sistem nilai. Nilai religius berfungsi sebagai sumber etika yang menghidupkan sila-sila lainnya, sehingga Pancasila memiliki fondasi moral yang kokoh sekaligus relevan dengan realitas sosial bangsa Indonesia. Nilai Islam berperan sebagai salah satu sumber moral substantif yang memperkaya pemaknaan Pancasila. Kontribusi ini bersifat kultural dan etis, bukan politis atau legalistik, serta berfungsi memperkuat etos keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan berbangsa.

Pendekatan ontologis terhadap nilai Islam dalam Pancasila memungkinkan pemahaman relasi agama dan negara secara lebih proporsional (Kaelan, 2014). Relasi tersebut tidak ditempatkan dalam kerangka dominasi atau subordinasi, melainkan dalam hubungan saling menguatkan pada tataran nilai. Dalam masyarakat plural, kontribusi nilai Islam tidak meniadakan nilai religius lainnya. Sebaliknya, nilai Islam berinteraksi secara dialogis dengan nilai agama dan budaya lain, sehingga Pancasila berfungsi sebagai ruang etik bersama yang inklusif dan mempersatukan.

1.3 Nilai Islam, Pancasila, dan Pembentukan Jati Diri Bangsa

Integrasi nilai Islam dalam pemaknaan Pancasila berimplikasi pada pembentukan jati diri bangsa Indonesia. Jati diri bangsa tidak hanya bersifat simbolik atau historis, tetapi tercermin dalam orientasi nilai yang membimbing sikap, perilaku, dan keputusan kolektif. Jati diri bangsa pada dasarnya bersifat normatif-etis karena dibangun di atas seperangkat nilai yang dijadikan pedoman bersama. Tanpa fondasi nilai yang kuat, identitas kebangsaan berisiko kehilangan daya ikat moral dan tereduksi menjadi formalitas. Nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, dan musyawarah memperkaya Pancasila sebagai sistem nilai yang hidup (Al-Ghazali, 2011). Nilai-nilai tersebut berkontribusi dalam membentuk etika sosial dan budaya politik yang berorientasi pada kepentingan bersama.

Proses pembentukan jati diri bangsa berlangsung melalui internalisasi nilai yang berkelanjutan. Pendidikan, keteladanan sosial, dan praktik kebijakan publik menjadi medium utama aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Dimensi transendensi nilai Islam memberikan legitimasi moral yang mencegah relativisme etis. Dengan basis moral yang kokoh, nilai Pancasila memiliki daya tahan dalam menghadapi perubahan sosial dan tantangan modernitas. Dalam etika publik, integrasi nilai Islam memperkuat pandangan bahwa kekuasaan merupakan amanah moral, bukan semata mandat politik (Magnis-Suseno, 2016). Pandangan ini menegaskan pentingnya tanggung jawab etis penyelenggara negara. Interaksi dialogis antara nilai Islam dan nilai lain dalam masyarakat plural memperkuat Pancasila sebagai orientasi moral kolektif. Jati diri bangsa dengan demikian terbentuk sebagai kesatuan nilai yang inklusif dan berkeadaban.

1.4 Penguatan Nilai Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam konteks praksis sosial, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berperan strategis sebagai ruang internalisasi nilai Pancasila. Pendidikan dalam bidang ini tidak sekadar berfungsi untuk mentransmisikan pengetahuan normatif (*civic knowledge*), tetapi lebih jauh bertujuan membentuk kesadaran moral (*civic disposition*) dan tanggung jawab etis warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan pendidikan berbasis nilai

menekankan bahwa Pancasila harus dihayati sebagai orientasi hidup (*way of life*). Nilai-nilai kebangsaan dan religius dipahami sebagai pedoman sikap yang relevan dengan realitas sosial peserta didik. Internalisasi nilai menuntut konsistensi antara materi pendidikan yang diajarkan di kelas dengan pengalaman sosial yang dialami di luar kelas.

Hal ini sejalan dengan teori Thomas Lickona (1991) mengenai pendidikan karakter, yang menyatakan bahwa internalisasi nilai yang efektif harus melibatkan tiga dimensi: pengetahuan moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*), dan tindakan moral (*moral action*). Ketika terdapat kesenjangan antara nilai yang diajarkan dan praktik sosial yang dialami—misalnya adanya ketidakteledanan di ruang publik—maka proses pembentukan karakter menjadi tidak efektif dan kehilangan kredibilitasnya.

Pendidikan Kewarganegaraan juga berfungsi sebagai ruang refleksi kritis. Peserta didik tidak hanya diarahkan untuk patuh secara formal terhadap aturan, tetapi didorong untuk mampu menilai realitas sosial dan politik berdasarkan timbangan nilai Pancasila. Pendekatan reflektif dan kontekstual ini memungkinkan pendidikan beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan fondasi moralnya.

Dalam pandangan Udin S. Winataputra (2001), PKn harus menjadi instrumen "pendidikan demokrasi" yang substantif. Nilai Pancasila tidak dipandang sebagai doktrin yang statis, tetapi ditafsirkan secara bertanggung jawab sesuai dengan tantangan kontemporer seperti digitalisasi dan globalisasi. Dalam jangka panjang, pendidikan nilai berkontribusi pada pembentukan warga negara yang berintegritas, berkeadilan, dan berkomitmen pada kehidupan bersama. Warga negara yang memiliki "kebijaksanaan kewargaan" (*civic virtue*) semacam ini merupakan prasyarat mutlak bagi keberlangsungan kehidupan demokratis yang berkeadilan.

Dengan demikian, penguatan Pancasila sebagai sistem nilai sangat ditentukan oleh keberhasilan internalisasi nilai melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Bagian ini menegaskan bahwa dimensi praksis merupakan kelanjutan logis dari kajian ontologis dan normatif nilai Pancasila. Jika ontologi memberikan dasar "mengapa" Pancasila itu ada dan benar, maka pendidikan kewarganegaraan menjawab "bagaimana" kebenaran nilai tersebut dihidupkan dalam kesadaran setiap warga negara.

Conclusion

Kajian ini menegaskan bahwa Pancasila tidak dapat dipahami semata-mata sebagai dasar normatif negara atau simbol ideologis, melainkan sebagai sistem nilai yang memiliki dasar ontologis dan daya ikat moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan ontologi nilai menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki legitimasi etis yang melampaui kepentingan pragmatis dan prosedural, sehingga berfungsi sebagai orientasi moral bagi individu, masyarakat, dan penyelenggara negara. Nilai Islam, dengan basis moral transendennya, berkontribusi secara substantif dalam menghidupkan makna etis Pancasila. Prinsip-prinsip seperti tauhid, keadilan, amanah, musyawarah, dan tanggung jawab sosial menunjukkan keselarasan ontologis dengan struktur nilai Pancasila, khususnya dalam memperkuat dimensi Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keadilan Sosial. Integrasi nilai Islam dalam pemaknaan Pancasila tidak dimaksudkan untuk mengideologisasikan agama, melainkan untuk menegaskan fondasi moral yang menopang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang inklusif dan berkeadilan.

Implikasi dari kajian ini menunjukkan bahwa penguatan Pancasila sebagai sistem nilai menuntut proses internalisasi nilai yang berkelanjutan, terutama melalui pendidikan kewarganegaraan dan praktik etika publik. Pendidikan nilai yang berorientasi pada pembentukan kesadaran moral dan tanggung jawab etis menjadi prasyarat penting bagi pembentukan jati diri bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila dapat berfungsi

secara efektif sebagai pedoman etis dalam menghadapi tantangan krisis nilai, pluralitas masyarakat, dan dinamika modernitas.

References

- Al-Attas, S. M. N. (1995). *Prolegomena to the metaphysics of Islam: An exposition of the fundamental elements of the worldview of Islam*. International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Al-Ghazali. (2011). *Ihya' 'ulum al-din* (Vol. 1). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Amri, S. R. (2018). Pancasila sebagai sistem etika. *Voice of Midwifery*, 8(1). <https://doi.org/10.35906/vom.v8i01.43>
- Aritonang, T. M., Siregar, A. M., Napitupulu, D., Purba, H. K., Nadeak, D. A. S., Siagian, Y. Y., Waruwu, J. P. S., & Jamaludin, J. (2024). Menerapkan perilaku Pancasila sebagai sistem etika pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan sehari-hari. *Indonesian Journal of Education and Development Research*, 3(1). <https://doi.org/10.57235/ijedr.v3i1.4575>
- Azra, A. (2003). *Pendidikan kewargaan (civic education): Demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani*. ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Bertens, K. (2013). *Etika*. Gramedia Pustaka Utama.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and education*. Macmillan.
- Kaelan. (2014). *Filsafat Pancasila: Pandangan hidup bangsa Indonesia*. Paradigma.
- Latif, Y. (2018). Pancasila sebagai sumber etika politik dan kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 22(1).
- Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- Magnis-Suseno, F. (2016). *Etika politik: Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*. Gramedia Pustaka Utama.
- Notonagoro. (1984). *Pancasila: Dasar falsafah negara*. Bina Aksara.
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. The University of Chicago Press.
- Ulpah, K., Ulpah, M., Hanafi, M., & Rusmaliati, R. (2025). Pancasila sebagai sistem etika. *Sultan Journal of Social Science*. 3(1), 7–10. <https://doi.org/10.71456/sultan.v3i1.1125>
- Winataputra, U. S. (2001). *Jatidiri pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana sistemik pendidikan demokrasi* (Disertasi doctoral). Universitas Pendidikan Indonesia.